



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 050/427 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BENDOSARI DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT NGUTER (CELEP) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawasan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Untuk Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari dan Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter (Celep) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

7

- 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- | | |
|---------|--|
| KESATU | Membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Untuk Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari dan Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter (Celep) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini |
| KEDUA | Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP-4D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. |
| KETIGA | Tujuan dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP-4D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Bendosari dan Pusat Kesehatan Masyarakat Nguter (Celep) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019. |
| KEEMPAT | <p>Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP-4D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :</p> <p>a mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :</p> |

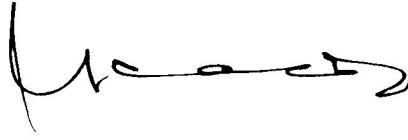
- 1 memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 - 2 melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan,
 - 3 memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan, dan
 - 4 TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMD.
- b memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
- 1 pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 - 2 pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan, dan
- c melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

KELIMA Susunan dan keanggotaan TP4D bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan atau surat perintah.

KEENAM Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati

- KETUJUH Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth

- 1 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang,
 - 2 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/427 TAHUN 2019
 Tanggal : 10 Juli 2019

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT BENDOSARI DAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT NGUTER (CELEP) KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah dan Pengendali TP4D Kejar Sukoharjo	Memberikan arahan dan mengendalikan terhadap seluruh kegiatan
2	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua TP4D Kejar Sukoharjo	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua TP4D Kejar Sukoharjo	Membantu tugas-tugas Ketua
4	UNUN SETYANINGSIH, SH NIP 19711027 199403 2 002 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan
5	CHOIRIN NUR WISUDARTO, SH NIP 19780506 200312 1 004 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	NURSIYAH WAHYUNI, SH NIP 1979031920000032001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	WAHYU AGUS PURWANTO, SH NIP 198501142009121002 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8	DJOKO TRI ATMOJO, SH NIP 19810823 200603 1 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9	WINARNI INDAH PRASETYO, SH NIP 19790802 200312 2 005 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10	AGNES VIRA ARDIAN, SH., MH NIP 198208282007122001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11	INDAH CHURNIYATI, SH NIP 197212311998032006 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim III	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12	GALUH TRI MURTI, SH NIP 19791128 200501 2 006 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13	SRI ZAINAL ARIFIN, SH NIP 19830314 200812 1 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA